

# **HAKIM DAN PANITERA: HAKIKAT JABATAN DAN KODE ETIKNYA**

Muhamad Iman

## **HAKIM DAN PANITERA: HAKIKAT JABATAN DAN KODE ETIKNYA**

**Muhammad Iman**

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu

[Muhammadimanmari@gmail.com](mailto:Muhammadimanmari@gmail.com)

### **Latar Belakang**

Dalam sistem peradilan, hakim dan panitera memainkan peran yang krusial demi mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum. Hakim bertanggung jawab dalam memutuskan perkara dengan penuh objektivitas dan independensi, memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku. Sementara itu, panitera berfungsi sebagai pilar administratif yang mendukung kelancaran pengelolaan berkas dan prosedur peradilan. Kolaborasi yang harmonis antara hakim dan panitera diperlukan agar tujuan utama sistem peradilan, yaitu menegakkan keadilan dan hukum yang berimbang, dapat tercapai.

### **Hakikat Jabatan Hakim**

Jabatan hakim adalah salah satu fondasi utama dalam struktur sistem peradilan. Sebagai pejabat negara di ranah yudikatif, hakim memiliki kewenangan untuk memimpin persidangan, menilai dan menganalisis fakta yang disampaikan, serta menetapkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, jabatan hakim diwarnai oleh beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman fundamental bagi hakim.

*Pertama*, independensi merupakan elemen esensial dari jabatan hakim. Seorang hakim harus bebas dari segala pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, individu tertentu, maupun kelompok kepentingan lainnya. Independensi ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat bersifat objektif dan adil, murni berdasarkan hukum tanpa tekanan pihak luar. *Kedua*, imparialitas atau ketidakberpihakan adalah prinsip yang menuntut hakim untuk tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Hakim wajib memutuskan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.

Hakim juga dituntut memiliki standar integritas dan moralitas yang tinggi, karena setiap keputusan yang diambil berpengaruh besar pada kehidupan seseorang. Integritas seorang hakim mencakup kejujuran, etika, serta dedikasi yang tulus terhadap kebenaran dan keadilan. Selain itu, hakim adalah penegak hukum yang berkewajiban memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan serta pelindung hak-hak asasi manusia.

Seorang hakim juga harus profesional dan kompeten dalam bidang hukum, memiliki pengetahuan yang mendalam, serta mampu menerapkannya dalam konteks yang berbeda-beda. Profesionalisme ini mencakup keseluruhan proses, mulai dari persiapan persidangan hingga pengambilan keputusan. Di sisi lain, meskipun seorang hakim memiliki independensi, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak akuntabel.

Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga keadilan bisa dilihat dengan transparan dan objektif.

## **Hakikat Jabatan Panitera**

Jabatan panitera adalah bagian integral dari sistem peradilan, yang bertugas mendukung hakim terutama dalam hal administrasi. Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen perkara, pencatatan jalannya persidangan, serta memastikan seluruh dokumen dan berkas dikelola dengan baik. Tugas mereka meliputi beberapa aspek penting, yaitu administrasi peradilan, di mana panitera bertanggung jawab terhadap kelancaran manajemen dokumen, serta mendukung proses hukum agar berjalan lancar.

Kerahasiaan informasi adalah aspek penting lainnya dalam jabatan panitera. Mereka wajib menjaga informasi dan dokumen perkara yang bersifat rahasia, guna melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Di samping itu, panitera dituntut profesional dalam setiap aspek kerjanya, yang mencakup pemahaman hukum dan prosedur pengadilan. Mereka juga harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang mencari keadilan, berfungsi sebagai penghubung antara pengadilan dan publik.

## **Kode Etik Hakim dan Panitera**

Agar dapat menjalankan perannya dengan baik, hakim dan panitera wajib mengikuti kode etik yang telah ditetapkan. Di Indonesia, kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Beberapa prinsip utama dalam kode etik hakim mencakup independensi, dimana hakim harus menjalankan tugas secara mandiri tanpa intervensi pihak luar, serta imparisialitas, yang menuntut hakim agar netral dan tidak berpihak. Prinsip integritas juga wajib dipegang teguh oleh seorang hakim untuk menjaga kejujuran, menghindari praktik-praktik korupsi seperti suap atau gratifikasi, dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, perlakuan setara terhadap semua pihak yang berperkara, serta menjaga kerahasiaan informasi adalah aspek lain yang penting.

Kode etik panitera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 122/KMA/SK/VII/2013, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berfokus pada prinsip kerahasiaan, integritas, netralitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Panitera harus menjaga kerahasiaan dokumen dan data terkait perkara, bekerja secara jujur, bersikap objektif dan netral, serta memiliki profesionalisme yang tinggi. Mereka juga harus menjalankan tugas dengan cermat dan patuh pada hukum.

## **Penutup**

Peran hakim dan panitera sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem peradilan yang adil dan transparan. Sebagai penegak keadilan, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai hukum yang berlaku, sedangkan panitera mendukung proses peradilan melalui pengelolaan administrasi yang efektif. Kode etik yang ditetapkan bagi hakim dan panitera menjadi pedoman penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan mematuhi kode etik ini, hakim dan panitera dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan keadilan dan menjaga hak-hak individu dalam masyarakat.